IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN SATU DESA SATU PRODUK UNGGULAN (GASSPOL) DI KECAMATAN KAJUARA KABUPATEN BONE

Abd Wahid[1], Mukrimah[2]

[1]Universitas Muhammadiyah Sinjai
Email: abdwahidstisipsinjai@gmail.com
[2]Universitas Muhammadiyah Sinjai
Email: mukrimahidris07@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Program Gerakan Satu Desa Satu Produk Unggulan (Gasspol) Di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, Informan yaitu Camat Kajuara, Kepala Desa, Pengurus BUMDes, Ketua BPD. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Gerakan Satu Desa Satu Produk Unggulan di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone sudah terealisasi dengan baik. Terlaksannya program Gasspol ini telah melewati beberapa indikator mulai tahapan sosialisasi atau penjabaran program baik sosialisasi ditingkat kecamatan dan sosilasiasi tingkat desa, tahap pengorganisasian, dan tahap aplikasi atau penerapan program, dengan didukung oleh beberapa faktor baik dari segi Komunikasi, Sumber Daya, Sikap dari Pelaksana dan Stuktur Brokrasinya. Salah satu desa yang menjadi realisasi atau sampel dari program ini adalah Desa Angkue. Salah satu ide baru dari pemerintah yang bekerja sama dengan pengurus BUMDes Lampu Toae dalam proses produksi yaitu dengan meluncurkan empat produk unggulannya yang terdiri dari keripik rumput laut, gammi, cumi-cumi kering dan balacen.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Produk Unggulan; Gasspol

PENDAHULUAN

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa saja bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat.

Dalam kebijakan perlu adanya implementasi. Tanpa implementasi maka kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar merupakan rencana indah yang tidak akan terwujud. Proses untuk melaksanakan

kebijakan pemerintah perlu mendapatkan perhatian yang seksama karena banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Proses kebijakan merupakan proses dinamis, banyak faktor yang mempengaruhinya. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memperoleh legitimasi dari lembaga legislatif telah memugkinkan birokrasi untuk bertindak, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan menyangkut peilaku-perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, yang akan mempengaruhi dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Oleh karena itu diperlukan adanya sistem kerja yang baik agar kebijakan itu dapat dilaksanakan sesuai harapan.

Untuk menuju pembangunan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengelolah daerah sehingga tercipta daerah yang produktif dan mandiri. Setiap daerah akan meningkatkan kemajuan diberbagai bidangnya seperti bidang sosial, budaya, politik, maupun ekonomi, terutama dalam bidang perekonomian akan memberikan dampak yang cukup besar jika justru perekonomian meningkat untuk memajukan daerahnya. Apalagi di era modern ini, memberikan peluang besar untuk setiap daerah yang berkembang dan memajukan daerahnya sendiri. Perkembangan perekonomian merupakan salah satu penopang suatu daerah untuk mencapai pembangunan nasional. Maka pemerintah harus mampu melakukan pemberdayaan masyarakat dengan cara menggali, mengolah dan membina masyarakat untuk mencapai potensi di setiap saerah tersebut.

Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, yang terdiri dari 17 Desa dan 1 Kelurahan merupakan salah satu Kecamatan yang mempunyai sumber daya manusia yang tinggi baik dan memiliki potensi wilayah yang beraneka ragam seperti potensi dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan. Di lihat dari segi ekonomi maka pemerintah Kecamatan Kajuara menciptakan suatu kebijakan sebagai inovasi aksi perubahan yang merupakan implementasi dari program kerja di bidang ekonomi dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat Desa di Kecamatan Kajuara.

Implementasi Program Gerakan Satu Desa Satu Produk Unggulan yang disingkat (GASSPOL) merupakan salah satu program unggulan yang diprakarsai oleh Camat Kajuara A.M.Guntur, S.I.P, M.Si. selaku reformer pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang diselenggarakan oleh BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kemendagri Regional Makassar sekaligus sebagai agen perubahan (change agent) di instansi dan daerah yang dipimpin khususnya Kecamatan Kajuara. Program ini bertujuan untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal Desa yang terfokus pada satu komoditas utama, sesuai potensi wilayah masing-masing serta melibatkan seluruh Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Kajuara.

Penjabaran program kerja ini perlu dikomunikasikan agar pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan selanjutnya untuk diteruskan kepada kelompok sasaran. Program ini diharapkan dapat memacu antar sesama Desa di Kecamatan Kajuara dalam menciptakan sesuatu yang inovatif dan kreatif sehingga bisa meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa. Salah satu Lembaga yang akan membangun dan menopang perekonomian

masyarakat Desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan usaha Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum yang ditetapkan dalam peraturan Desa sebagai pilar ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai Lembaga Sosial (Social Instution) dan Lembaga Komersial (Commercial Instution). Berarti BUMDes adalah Lembaga yang memprioritaskan kepentingan masyarakat melalui partisipasi dalam penyediaan pelayanan sosial masyarakat Desa. Tujuan utama BUMDes adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Analisis terhadap Kebijakan Pemerintah dalam implementasi aksi perubahan Gasspol Kajuara diharapkan bisa menjadi sebuah gerakan yang dapat mendorong pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat Desa dan mampu meningkatkan ekonomi Desa. Dengan Demikian, berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, peneliti mengangkat judul Implementasi Program Gerakan Satu Desa Satu Produk Unggulan (Gasspol) di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.

LITERATURE REVIEW

Pengertian Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004:64) adalah Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, mengimplementasikan berarti menyediakan sesuatu, dan untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan saran untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan". Adapun Schubert Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman. 2002:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa. Implementasi adalah peluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004:39). Menurut Harsono (2002:67) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempuranaan program.

Implementasi merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahan program yang sah dari suatu program yang meliputi upaya mengelola input. Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2006:124) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-

individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup usaha suntuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh program.

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman (2002:170), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Guntur Setiawan (2004:39) berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

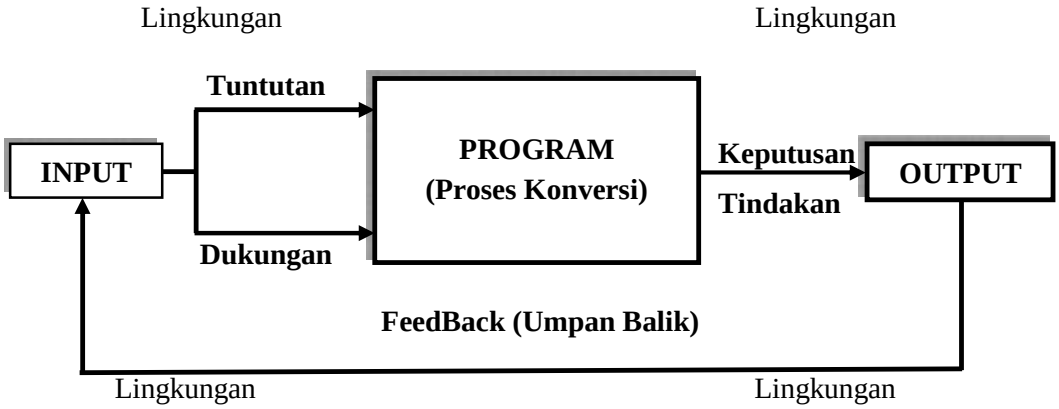
Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi tercapainya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Implementasi Program

Implementasi program merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri, Jones (dalam Arief Rohman 2009:101-102) menyebutkan implementasi program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan unsur pertama uang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus di penuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program di implementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya (eksekutif).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implememtasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat tehadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan. Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan

oleh David Easton. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih di kenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian korten digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Model Kesesuaian Implementasi program

Easton menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Easton menyatakan bahwa suatu program akan berhasil jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pada model Eston, kebijakan bermula dari adanya input berupa masukan yang berasal dari lingkungan baik intern maupun ekstern. Kemudian masukan yang berupa tuntutan dan dukungan tersebut berjalan hingga masuk ke dalam agenda pemerintahan sehingga akhirnya keluar sebagai output yang berupa kebijakan dan diumpan balikkan kembali kepada lingkungan.

Kesimpulannya program merupakan interpretasi dari sebuah kebijakan pemerintah yang berisi instruksi, yang dibuat untuk memperbaiki permasalahan yang sedang berkembang. Program harus ada dalam mengimplementasikan suatu kebijakan agar hal tersebut dapat berjalan dengan sistematik dan sesuai dengan tujuan awal dari program tersebut.

Tahap-Tahap Implementasi

Menurut Charles O. Jones (Siti Erna Latifi Suryana, 2009:28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program, yaitu:

1. Tahap Interpretasi (Interpretation)

Merupakan tahapan penjabaran sebuah program kerja yang bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Aktivitas interpretasi kebijakan tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (sosialiasi) agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran kebijakan. Sebuah program kerja perlu di komunikasikan atau disosialisasikan agar mereka yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan program. Maka dari itu para

pelaksana harus mampu menjalankan program sesui dengan petunjuk teknis dan petunjuk agar tujuan tang diharapkan dapat tercapai.

2. **Tahap Pengorganisasian *(to Organize)***

Tahap ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa menjadi pelaksana suatu program (penentuan lembaga organisasian mana yang akan melaksanakan dan siapa pelakunya, penetapan aggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan dan mempertanggungjawabkan). Penetapan prasarana dan sarana (apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan), penetapan tata kerja, penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan. Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berkualitas.

3. Tahap Penerapan atau Aplikasi (*Application*)

Pada tahap implementasi perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih, sehingga tidak bertentangan antara unit kegiatan yang terdapat di dalamnya. Program kerja harus sudah terprogram dan terencana dengan baik, sehingga tujuan program dapat direalisasikan dengan efektif. Dan program yang sudah ada harus dijadwalkan kapan dimulai dan diakhiri suatu program agar mudah dalam mengadakan evaluasi. Dalam hal ini yang diperlukan adanya tanggal pelaksanaan dan rampungnya sebuah program sudah ditentukan sebelumnya.

Pengembangan Ekonomi melalui BUMDes

1. Defenisi Pengembangan Ekonomi

Pengembangan ekonomi adalah suatu usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam bidang ekonomi dan mendayagunakan kemampuan *life skill* (keahlian hidup) yang dimiliki oleh masyarakat. Pengembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian suatu kelompok masyarakat secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah itu sendiri. Untuk meningkatkan pembangunan daerah terutama daerah yang sedang berkembang, maka pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut melalui pengembangan ekonomi.

Dapat disimpulkan pengembangan ekonomi bertujuan suatu bentuk untuk usaha bersama dan terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, baik dari perubahan yang berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik dalam periode tertentu. Pengembangan ekonomi lebih kearah bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat atau lainnya mengalami

perubahan berupa perkembangan dari beberapa sektor atau faktor pendukungnya. Dalam pengembangan ekonomi ada beberapa faktor pendukung yaitu sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan budaya. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bertujuan ke arah yang lebih baik, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat berkembang.

Pengembangan ekonomi masyarakat juga merupakan proses pengelolaan potensi Desa yang dimobilisasi masyarakat setempat. Proses pengelolaan potensi juga harus dilakukan dengan perencanaan dan strategi yang matang, karena proses tersebut mengkombinasikan sumber daya manusia dan alam sehingga tercipta kesinambungan dalam mengatasi permasalahan masyarakat dan masalah Desa lainnya.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Defenisi BUMDes

Menurut pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli Desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi ini akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan "goodwill" dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan. BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga Desa.

Berdasarkan uraian diatas makan dapat disimpulkan bahwa BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah Desa dan pengeloannnya dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PAD).

b. Tujuan BUMDes

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah: 1) Meningkatkan perekonomian Desa; 2) Meningkatkan pendapatan asli desa; 3) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan Masyarakat; 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Mili Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produkif Desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable.

3. Pengembangan Ekonomi melalui BUMDes

BUMDes menjadi hak Desa untuk memanfaatkan aturan Undang-Undang Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan Desa, terutama dalam hal peningkatan perekonomian Desa dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa. BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi Desa masyarakat yang dikelola secara baik dan profesional. Keberadaan BUMDes menjadi harapan masyarakat Desa untuk meningkatkan ekonomi Desa melalui pengelolaan keuangan Desa yang di dasarkan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes).

Pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes dengan memobilisasi potensi. Berkaitan dengan persoalan ekonomi pedesaan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah pedesaan. Namun demikian, strategi penyelesaian persoalan ekonomi pedesaan menjadi lebih baik, antara lain sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan potensi Desa, pertanian berkelanjutan, dan Peternakan berbasis diverifikasi produk. Pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes dapat disimpulkan dari sisi kelembagaan BUMDes yang dibentuk pemerintah sebagai lembaga sosial dan komersial. Dimana BUMDes menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat dan dapat meningkatkan keuangan Desa dari program-program yang ada.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Camat Kajuara, Kepala Desa Angkue, Pengurus BUMDes dan Badan Permusyawaratan Desa.

Sejalan dengan metode yang digunakan yakni deskriptif kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang rencana peneliti gunakan untuk memperoleh fakta mengenai variabel yang diteliti adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah proses pengumpulan data. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini dilakukan cara Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan *Verifikasi* (Penarikan Kesimpulan).

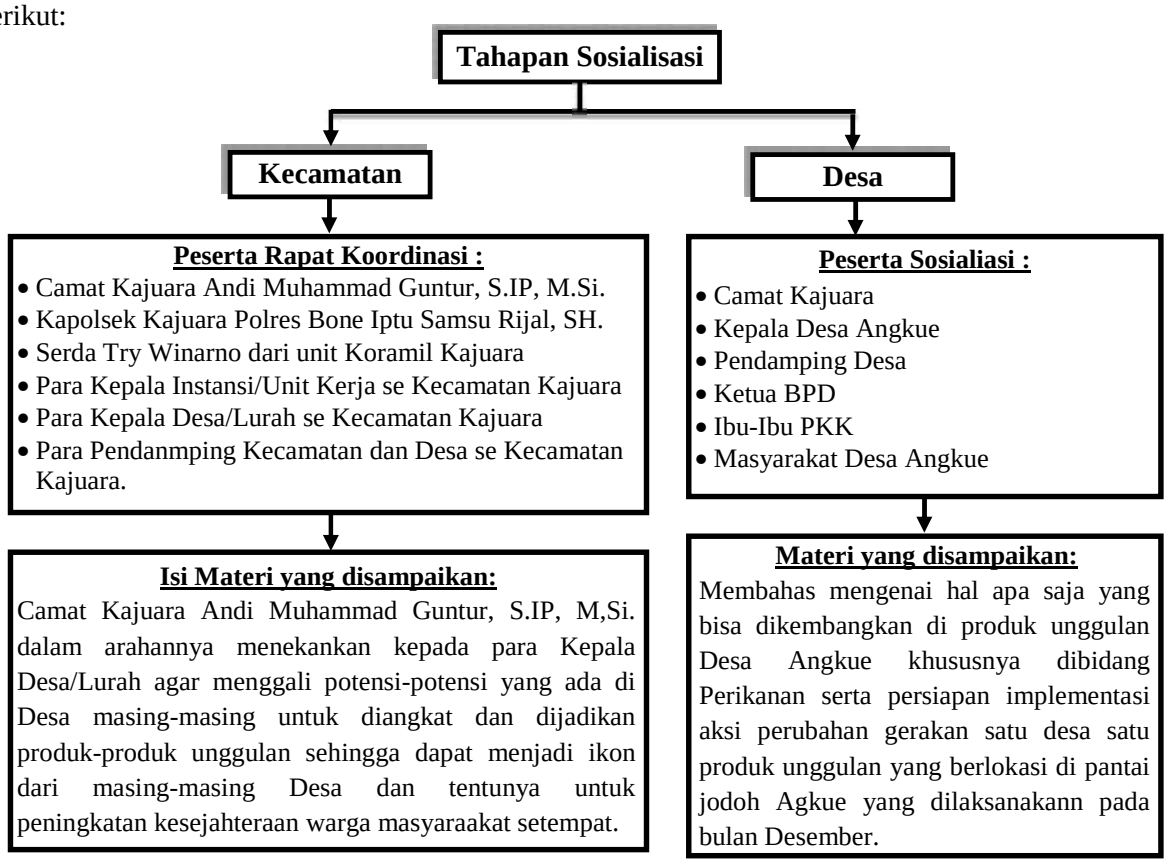
PEMBAHASAN

Implementasi Program Gerakan Satu Desa Satu Produk Unggulan adalah langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri dalam mendorong pemberdayaan ekonomi lokal Desa yang terfokus pada satu komoditas utama, sesuai potensi wilayah

masing-masing serta melibatkan seluruh Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Kajuara, dengan indikator-indikator berikut ini :

Tahap Interpretasi (Komunikasi atau Sosialiasi)

Pada tahap ini pelaksanaan program gerakan satu desa satu produk unggulan telah ikomunikasikan atau disosialisasikan baik ditingkat Kecamatan maupun sosialisasi ditingkat Desa, dan mendapat banyak dukungan dari berbagai dinas seperti Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Perikananan, Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa), dukungan dari Sekda (Sekertaris Daerah) , dan semua Kepala Desa se Kecamatan Kajuara, khususnya Bapak Bupati Bone yang sangat mendukung sekali dengan adanya aksi perubahan ini di Kecamatan Kajuara. Gasspol (Gerakan Satu Desa Satu Produk Unggulan) adalah aksi perubahan yang digagas oleh Camat Kajuara sebagai reformer melalui beberapa tahapan Sosialisasi sampai terlaksananya program Gasspol ini sebagai berikut:



Gambar 2 Proses Sosialisasi Program Gasspol

Dengan adanya program Gasspol ini sebetulnya lahir ketika Camat Kajuara mengikuti Diklat Kepemimpinan Administrator jenjang struktural. Salah satu outputnya adalah setiap peserta diklat itu wajib memunculkan inovasi aksi perubahan. Terkait dengan implementasi program gerakan satu desa satu produk unggulan (Gasspol) telah dilakukan sosialisasi di tingkat kecamatan melalui rapat koordinasi dengan mengundang semua kepala desa dan pendamping desa se Kecamatan Kajuara pada

Bulan Oktober tahun 2020 dan juga sosialisasi di lapangan yang di jadikan sampel yaitu tepatnya di Desa Angkue. Tahap sosialiasi dilakukan dengan dua tahapan sosialisasi mulai dari sosialisasi tingkat Kecamatan dalam kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi di tingkat Desa, rinciannya sebagai berikut:

Tabel 1 Tahapan Sosialisasi Program Gasspol

No.	Kegiatan	Tempat/Waktu	Peserta	Ket.
1.	Sosialiasi Tingkat Kecamatan (Rapat Koordinasi)	Aula Kantor Camat Kajuara/ 06 ktober 2021	Camat Kajuara, Kapolsek Kajuara, Koramil, Para Kepala Instansi/Unit Kerja, Para Kepala Desa/Lurah, Para Pendamping Kecamatan dan Desa se Kecamatan Kajuara,	Terlaksana
2.	Sosialisasi Tingkat Desa	Aula Kantor Desa Angkue/ 22 Oktober 2020	Camat kajuara, Kepala Desa Angkue, Pendamping Desa, BPD, Ibu-Ibu PKK, Masyarakat Desa Angkue.	Terlaksana

Sumber Data: Pengurus BUMDes (Agustus 2021)

Tahap interpretasi atau tahap penjabaran program kerja terkait implementasi program gerakan satu desa satu produk unggulan di Kecamatan Kajuara sudah terlaksana dengan baik dan tersampaikannya program kegiatan melalui sosialisasi baik ditingkat Kecamatan dan sosialisasi tingkat Desa. Maka dari itu mereka yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung mengetahui maksud dan tujuan dari program gasspol tersebut, perkiraan sumber daya, teliti dan konsisten serta dukungan masyarakat dan sikap masyarakat yang ikut berpatisipasi dalam menciptakan produk unggulan khususnya di Desa Angkue.

Tahap Organisasi

Dalam implementasi program gerakan satu desa satu produk unggulan perlu adanya suatu lembaga atau organisasi yang melaksanakan program ini, penetapan siapa yang menjadi pelaksana dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas dan dari mana sumber anggaran yang diperlukan. Maka, program Gasspol yang digagas oleh Camat Kajuara bekerja sama dengan pengurus BUMDesma dan BUMDes se Kecamatan Kajuara. Desa Angkue yang menjadi sampel terlaksananya program Gasspol yang merupakan terobosan dari Bumdesma. Terdapat 8 (Delapan Desa yang bekerja sama dengan Bumdes Lampu Toae (Desa Tarasu, Desa Pude, Desa Ancu, Desa Polewali, Desa Padaelo, Desa Mallahae, Desa Massangkae, dan Desa Angkue).

Tabel 4.2 Pengurus BUMDesma

No.	Nama Desa	Nama BUMDes	Unit Usaha/Produk
1.	Tarasu	Siamasei	SPP (Simpan Pinjam)
2.	Pude	Mattiro Deceng	SPP (Simpan Pinjam)
3.	Ancu	Asseddingetta	Depot Air Minum Isi Ulang
4.	Polewali	Sipakainge	SPP (Simpan Pinjam)
5.	Padaelo	Padaidi	- Depot Air Minum Isi Ulang, - Song Sistem
6.	Mallahae	Sepakat	SPP (Simpam Pinjam)

7.	Massangkae	Helo Sejahtera	- SPP (Simpan Pinjam), - Bidang Usaha Peternakan (Penggemukan Sapi). - BRI Link, - Asap Prodi (Bidang Tambak)
8.	Angkue	Ta'Disangka (Lampu Toae)	- Depot Air Minum - Foto Copy & ATK - Keripik Rumput Laut, Gammi, Cumi-Cumi Kering, dan Balacen.

Sumber Data: Pengurus BUMDes (Agustus 2021)

Tahap organisasi telah dirancang fungsi dari masing-masing pelaksana kegiatan program Gasspol ini, BUMDesa Bersama Kawasan Lampu Toae merupakan salah satu BUMDes yang ada di Wilayah Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone yang didirikan oleh Delapan Desa Kawasan Pesisir di Kecamatan Kajuara yang sangat memungkinkan untuk pengembangan usaha dibidang perikanan dan kelautan serta bidang lainnya sehingga memacu semua Desa untuk bisa mengimplementasikan program Gerakan Satu Desa Satu Produk Unggulan (Gasspol) yang bernilai ekonomis. Terkait dengan pengorganisasian dalam implementasi program Gasspol, jika berbicara mengenai Sumber Daya Manusia (SDA) yaitu dari pelaksana program ini adalah BUMDes se Kecamatan Kajuara dan juga pasti telah dibentuk tim kerja dari kecamatan yang ikut membantu mensukseskan pelaksanaan Gasspol dan juga sudah ada surat keputusan Bupati. Sumber Daya Anggaranya (SDA) berasal dari dana BUMDes yaitu APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa).

Dalam pelaksanaan program kerja perlu adanya tahapan pengorganisasian yang akan menjadi agen pelaksana dalam implementasi Gasspol di Kecamatan Kajuara. Struktur organisasi dalam suatu badan sangat berperan penting dimana untuk melakukan keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan dibutuhkan suatu struktur organisasi yang tertata rapih guna tercapainya suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Dalam hal bentuk struktur organisasi kecamatan, kegiatan Gasspol di rancang di kecamatan dan Desa Angkue terpilih sebagai sampel dari implementasi program gerakan satu desa satu produk unggulan. Jadi pelaksananya ada dari tim kecamatan dengan BUMDes Lamputoae Angkue. Terkait masalah Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai tenaga pelaksana yang kelola Gasspol ini sudah kompeten dan ide-ide kreatif terealisasi, karena adanya sumber daya saing bagaimana cara agar potensi yang ada di Desa bisa dikembangkan sebagai unit usaha bernilai tinggi. Jangan sampai modal yang diberikan tidak bisa dikelola untuk dikembangkan dan digunakan untuk menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Begitupun dengan masalah anggaran dana desa Bumdes berjalan sescara administratif bagus administrasinya bagus juga pertanggungjawabannya, dan mengenai dana Gasspol kemarin pertama dikasi ada Seratus Jutaan.

Bentuk pengorganisasian atau stukrur organisasi pelaksana dalam implementasi program gerakan satu desa satu produk unggulan (Gasspol) di kecamatan kajuara sudah jelas sesuai fungsi dan tujuan masing-masing. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam organisasi, yaitu orang-orang yang

terlibat dalam dalam program Gasspol di Kecamatan Kajuara sudah memiliki kompetensi yang baik sesuai bidangya masing-masing. Dimana pelaksana dari program ini adalah seluruh BUMDes se Kecamatan Kajuara, dan untuk realisasi sampel dari pelaksanaan program ini yaitu Bumdes Lamputoae Desa Angkue, untuk biaya operasional atau Sumber Daya Anggarannya sendiri berasal dari dana Bumdes yang diberikan.

Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi ini adalah tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan program Gasspol ke dalam realitas nyata. Di mana tahap ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan mulai dari tahap sosialisasi dan pengorganisasian. Dengan kata lain, aplikasi merupakan penerapan segala keputusan dan peraturan yang berpedoman pada *programmed dan implementation* (ketentuan dan prosedur) dan *adapted implementation* adalah perubahan dan penyesuaian terhadap keadaan agar tercapainya suatu kebijakan.

Tujuan dari pelaksanaan program Gasspol di Kecamatan Kajuara ini yaitu (1) Pertama tujuan jangka pendek yaitu dengan adanya beberapa desa yang dijadikan sampel khususnya Desa Angkue dengan beberapa produk unggulannya terhadap realiasasi program ini, (2) Kedua tujuan jangka menengah atau panjang yaitu diharapkan dari semua 17 Desa yang ada di kecamatan kajuara bisa melaksanakan program Gasspol tersebut dan bisa menghasilkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) secara berkelanjutan. Diharapkan semua Desa juga bisa memunculkan produk unggulannya masing-masing sesuai ciri khas desanya. Contohnya Desa Angkue dengan ciri khas rumput laut, Desa Ancu, Desa Polewali, Desa Massangkae dengan ciri khas ikannya yang memiliki potensi dibidang perikanan, dan Desa Bulu Tanah dengan potensi di bidang peternakan.

Filosofi dari pelaksanaan Gasspol ini adalah bagaimana agar supaya potensi lokal yang ada di masing-masing desa bisa dikelola dengan baik oleh BUMDes sehingga bisa berputar nilai tambah secara ekonomi kepada masyarakat dan adapun faktor pendukung sebenaranya banyak kita punya SDA yang beraneka ragam, SDM yang baik, serta kemauan dan motivasi atau pencerahan kepada pemerintah desa untuk menciptakan berbagai kegiatan usaha. Hal ini akan menjadi masukan dalam penelitian ini, dimana tahap pengaplikasian atau penerapan program Gasspol ini sudah terlaksana dengan baik sesuai prosedur kerja yang telah ditetapkan khususnya sebagai sampelnya yaitu Desa Angkue. Dengan adanya Program Gasspol ini di Kecamatan Kajuara khususnya bagi Desa Massangkae sendiri kami memiliki empat unit usaha baru dalam BUMDes yang alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan yaitu terdiri dari BRI Link, Bidang Peternakan yaitu penggemukan sapi, SPP (Simpan Pinjam), dan Asap Prodi yang bergerak di bidang tambak yang sangat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat setempat. Melaui program Gasspol ini bisa memacu kami khususnya pengurus BUMDes Desa Massangkae untuk terus mengembangkan unit usaha-usaha baru yang produktif yang bernilai ekonomis.

Ttahap aplikasi program Gasspol ini sudah terealisasi dengan baik dengan baik di beberapa Desa se Kecamatan Kajuara khususnya Desa Angkue yang menjadi salah satu sampel Implementasi Program Gasspol dengan berbagai unit usaha dan beberapa produk unggulan dari masing-masing Desa yang digagas oleh Camat Kajuara selaku reformer, rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3 Aplikasi Program Gasspol

No.	Nama BUMDes	Unit Usaha/Produk	Dampak ke Masyarakat Adanya Gasspol
1.	Lampu Toae (Desa Angkue)	Depot Air Minum Foto Copy & ATK Keripik Rumput Laut, Gammi, Cumi-Cumi Kering, dan Balacen.	Memacu masyarakat Desa Angkue untuk terus mengembangkan produk-produk unggulannya yang bisa mendorong kemajuan perekonomian. Khususnya di Desa Angkue sendiri memberikan dampak yang cukup tinggi bagi para masyarakat nelayan karna bahan-bahan dari produk unggulan BUMDes Lampu Toae di beli langsung dari nelayan seperti cumi, agar-agar, ikan teri dan lain-lain.
2.	Helo Sejahtera (Desa Massangkkae)	Simpan Pinjam, Bidang Usaha Peternakan (Penggemukan Sapi). BRI Link, Asap Prodi (Bidang Tambak)	Memotivasi Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Massangkae dalam mendorong agar supaya potensi lokal yang ada di Desa dikelola dengan baik dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi sehingga berputar nilai tambah secara ekonomi kepada Masyarakat dan Pemerintah Desa.
3.	Asseddigetta (Desa Ancu)	- Depot Air Minum	Memberikan peluang bagi masyarakat untuk berwirausaha, terkait adanya program Gasspol ini dalam hal pemberdayaan ekonomi memberikan keuntungan besar bagi masyarakat karena masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan usaha sesuai potensi lokal yang ada di Desa Ancu ini dan tentunya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Sumber Data : Pengurus BUMDes (Agustus 2021)

Dari hasil penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tahap aplikasi atau penerapan dari program gerakan satu desa satu produk unggulan (Gasspol) di Kecamatan Kajuara terlaksana dengan baik. Di mana Desa Angkue sebagai salah satu Desa yang menjadi sampel implementasi program Gasspol ini dengan meluncurkan beberapa produk unggulannya diantaranya keripik rumput laut, gammi, cumi-cumi kering dan balacen. Dalam pelaksanaan program Gasspol ini sudah melewati beberapa tahapan sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan mulai dari tahap sosialisasi, terbentuknya tim kerja, terwujudnya legalitas (dasar hukum) dan surat keputusan dari Bupati Bone, sampai terlaksananya Gasspol ini di Desa Angkue Kecamatan Kajuara pada tanggal 3 Desember 2020.

KESIMPULAN

Implementasi Gerakan Satu Desa Satu Produk Unggulan di Kecamatan Kajuara sudah terlaksana dengan baik dengan menggunakan indakator yang dikemukakan dalam Teori O. Jones berupa tahapan yaitu tahap Interpretasi ini sudah terlaksana dengan baik dengan melakukan sosialisasi baik ditingkat kecamatan maupun tingkat Desa maka dari itu mereka yang terlibat baik langsung

maupun tidak langsung mengetahui maksud dan tujuan dari program gasspol tersebut, perkiraan sumber daya, teliti dan konsisten serta dukungan masyarakat dan sikap masyarakat yang ikut berpatisipasi dalam menciptakan produk unggulan khususnya di Desa Angkue.

Adapun pada tahap organisasi atau stukrur organisasi pelaksana dalam implementasi program gerakan satu desa satu produk unggulan (Gasspol) di Kecamatan Kajuara sudah jelas sesuai fungsi dan tujuan masing-masing. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam organisasi yang berkompeten, pembentukan tim kerja, adanya legalitas hukum dan surat keputusan dari Bupati, dan anggaran dana yang sudah diberikan dari pemerintah melalui dana BUMDes itu sendiri. Dan terkait dengan tahap aplikasi atau penerapannya sudah terealisai dengan baik khususnya di Desa Angkue dan sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan. Adapun impact (dampak) bagi masyarakat setempat dengan terlaksananya program ini bisa mendorong perekonomian yang ada di Desa dan menghasilkan Pendapatan Asli Desa yang tinggi.

REFERENSI

Agostiono. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn,* http//kertyawitaradya.wordpress.

Arsiyah. 2002. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa.* Malang: Universitas Brawijaya Malang.

Anonymous. 2009. *Pendekatan Utuh Penguatan Kelembagaan Ekonimi Desa.* http://www.keuangandesa.com/pendekata-utuh-penguatan-kelembagaan-ekonimi-desa

Abdul Harsin. 2018. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat*. Tesis, di publikasikan oleh http://repository.radenintan.ac.id/.

David W Telenggen. et.al. 2020. *Implementasi Program Prioritas Dalam Pengelolaan Administrasi Kampung Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya.* 3(2), 83-92.

Dimas Rizki R. 2019. *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Penelitian di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*. Tesis, di publikasikan oleh http://repository.radenintan.ac.id/.

Edward III, George C. 1980. *Implementing Publik Policy*. Washington C: Congressional Quarterly Press.

Edward III, George C (edited). 1984. *Public Policy Implementing.* London-England: JaiPress Inc.

Lilik Zumrotus S. 2020. *Implementasi Program BUMDes Untuk Menumbuhkan Ekonomi Kreatif Masyarakat (Desa Papar , Kecamataan Papar Kabupaten Kediri).* http://repository.untag-sby.ac.id.

Only S.prijino dan A.M.W Pranaka. 1996. *Mengenai Pemberdayaan:konsep, Kebijakan dan Implementasi.* Jakarta: CSIS.

Pressindo. Bone Berita. (2020, 3 Desember). *Hebat, Kecamatan kajuara Luncurkan Produk Unggulan Gasspoll,* dari https://bone.go.id.

Permendagri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Romauly Ferbiana Silitonga. 2017. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat*. https://lib.unnes.ac.id/

Regita Jeniver Sangala. et.al. 2020. *Implementasi Program Aplikasi Sistem Pemantauan Masyarakat (SITASYA) Di Kota Manado*. dari http://scholar.google.id

Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 *Tentang Desa.*

https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_publik.

https://media.neliti.com/media/publications/74983-ID-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implemen.pdf.